



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12127-12138
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Residu Demokrasi, Menggali Makna Konflik Sosial Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa: Analisis Fenomenologi Empirik

Tiara Dewi^{1✉}, Gun Gun Gumilar², Rachmat Ramdani³
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2110631180167@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, konflik sosial muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti perselisihan kepemilikan lahan, ketidakadilan ekonomi, dan dinamika politik lokal, terutama saat pemilihan kepala desa. Perselisihan dalam pemilihan kepala desa, sebagaimana yang terjadi di Desa Tegalwaru, telah memicu ketegangan yang signifikan, mengakibatkan perpecahan di kalangan warga. Dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi Empirik dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara yang dilakukan secara informal dengan masyarakat. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan terkait waktu dan sumber daya, serta kemungkinan adanya bias dalam pengumpulan data, hasilnya diharapkan memberikan wawasan yang bermanfaat. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika transformasi konflik di tingkat desa, sementara secara praktis, temuan ini dijadikan panduan bagi pemerintah desa untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola konflik sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dapat menjadi panduan dalam menciptakan kondisi damai di tengah masyarakat. Selain itu, pendekatan transformasi ini berpotensi menjadi solusi untuk mengatasi situasi serupa di masa depan, sehingga masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

Kata Kunci : *Analisis Fenomenologi Empirik, Residu Demokrasi, Konflik Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa*

Abstract

In rural communities, social conflicts arise due to various factors, such as land ownership disputes, economic inequality, and local political dynamics, particularly during village head elections. In Village Tegalwatu, a recent village head election created significant tension, leading to divisions among residents. This study aims to explore the crucial role played by the village government in managing emerging social conflicts and to gain a deeper understanding of how conflict transformation approaches are applied to ease existing tensions. Using a qualitative approach, this research involves data collection through direct observation and in-depth interviews with various village stakeholders, as well as informal interviews with community members. The conflict transformation theory developed by John Paul Lederach (2003) serves as the foundation for analyzing social interactions and village governance structures, emphasizing the importance of inclusive and participatory dialogue in the conflict resolution process. Although this study has limitations in terms of time and resources, as well as potential biases in data collection, its findings are expected to provide valuable insights. Theoretically, this research contributes to the understanding of conflict transformation dynamics at the village level, while practically, its findings serve as a guide for village governments to enhance their capacity in managing social conflicts. This study is expected to offer significant benefits and serve as a reference for fostering peaceful conditions within society. Furthermore, the transformation approach has the potential to become a viable solution for addressing similar situations in the future, ensuring that communities are better prepared to face potential challenges.

Keywords: : *Social Conflict, Conflict Transformation, Village Government, Community Participation.*

PENDAHULUAN

Seiring Konflik sosial di pedesaan sering kali muncul akibat dinamika politik lokal, khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang meski dimaksudkan sebagai wujud demokrasi, justru kerap menimbulkan polarisasi dan perpecahan masyarakat (Hikam, 2019; Munandar, 2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pilkades harus menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, praktik di lapangan kerap berbeda, karena proses kontestasi politik sarat mobilisasi sumber daya sosial, kultural, dan ekonomi yang memicu konflik kepentingan (Edi, 2019).

Fenomena ini terlihat pada Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Karawang, khususnya Desa Tegalwaru. Pemilihan yang diikuti dua calon kepala desa justru melahirkan rivalitas tajam antarpendukung, fragmentasi sosial, serta kebijakan kepala desa terpilih yang hanya mengakomodasi kelompoknya. Kondisi ini memperdalam ketegangan sosial, mengurangi solidaritas, dan menumbuhkan rasa saling tidak percaya antarwarga. Konflik pasca-Pilkades serupa juga ditemukan dalam penelitian Munandar (2021), Hikam (2019), dan Utami (2021),

yang menunjukkan bahwa ketidakadilan distribusi kekuasaan di desa dapat memperparah kecemburuan sosial dan mengancam harmoni masyarakat.

Dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan konsep transformasi konflik menurut John Paul Lederach (2003), yang menekankan empat dimensi perubahan: personal, relasional, kultural, dan struktural. Pendekatan ini penting untuk menciptakan rekonsiliasi dan tata kelola desa yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada konflik sosial pasca-Pilkades Desa Tegalwaru dengan tujuan Menganalisis proses transformasi konflik pasca-Pilkades melalui pendekatan fenomenologi empiris serta menggali makna residu demokrasi yang muncul dari dinamika konflik sosial-politik di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi empirik sebagaimana dikembangkan oleh Van Kaam (1966) dan Giorgi (1985) dalam Clark Moustakas (1994). Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna subjektif dari konflik sosial-politik pasca pemilihan kepala desa, dengan menekankan pengalaman langsung partisipan secara reflektif dan kontekstual. Penelitian dilaksanakan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selama periode pasca Pilkades 2021 dengan melibatkan partisipan yang dipilih secara purposif, meliputi calon kepala desa, tim sukses, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga pendukung dari kedua kubu.

Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan langkah fenomenologi menurut Moustakas (1994), yaitu epoche, horizontalisasi, pengelompokan unit makna, deskripsi tekstural dan struktural, hingga sintesis esensi pengalaman. Keabsahan data dijaga melalui standar trustworthiness Lincoln dan Guba, meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sehingga hasil penelitian dapat merefleksikan secara akurat makna pengalaman partisipan terhadap konflik sosial politik pasca pemilihan kepala desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada pengalaman masyarakat Desa Tegalwaru pasca Pilkades 2021 dengan pendekatan fenomenologi empirik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pilkades bukan sekadar proses politik prosedural, melainkan meninggalkan residu demokrasi berupa ketegangan, polarisasi, dan penurunan solidaritas sosial.

Gambaran umum lokasi memperlihatkan bahwa Desa Tegalwaru merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Struktur sosial masih kental dengan ikatan kekerabatan, patronase, serta pengaruh tokoh masyarakat dan agama, sehingga orientasi politik warga tidak hanya dipengaruhi visi-misi calon, melainkan juga kedekatan emosional dan relasi sosial. Deskripsi partisipan menegaskan adanya keberagaman pengalaman antara pendukung kubu pemenang dan pihak yang kalah. Pendukung pihak kalah cenderung merasa terasing dan diperlakukan tidak adil, sementara pendukung pemenang lebih merasa diakomodasi dalam pemerintahan desa.

Hasil analisis fenomenologi menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berhenti pada ranah politik, melainkan meluas ke ranah sosial, budaya, dan pelayanan publik. Budaya gotong royong melemah, interaksi antarwarga menurun, serta muncul diskriminasi dalam pelayanan administrasi desa. Meskipun, fragmentasi sosial cukup kuat, penelitian juga menemukan adanya harapan rekonsiliasi. Beberapa warga masih mendorong pemulihan kohesi sosial, netralitas pemerintahan desa, dan kembalinya budaya gotong royong sebagai identitas kolektif masyarakat.

Fragmentasi Sosial Pasca Pilkades

Pilkades 2021 di Desa Tegalwaru memberikan gambaran nyata bagaimana demokrasi lokal dapat menyisakan residu konflik yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat desa.

Pertama, fragmentasi sosial muncul karena warga terbelah ke dalam dua kubu. Hubungan antarwarga menjadi renggang, partisipasi gotong royong menurun, dan interaksi sehari-hari diwarnai jarak psikologis. Fragmentasi bahkan merambah kegiatan kesehatan dan lembaga pemerintahan desa, memperlebar jurang antar kelompok.

Kedua, diskriminasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan desa menjadi temuan penting. Warga dan perangkat desa yang dianggap tidak loyal diperlakukan kurang adil dalam pelayanan administrasi maupun akses ekonomi. Hal ini memperlihatkan praktik politik eksklusif yang menggunakan pelayanan publik sebagai sarana kontrol sosial.

Ketiga, euforia kemenangan dan rasa keterasingan berjalan berdampingan. Pendukung pemenang merasakan kebanggaan, tetapi sekaligus kehilangan keakraban sosial karena hubungan dengan pihak yang kalah menjadi renggang. Bagi pihak kalah, kekalahan politik menimbulkan perasaan terasing hingga pengucilan dari aktivitas sosial dan ekonomi.

Keempat, dampak polarisasi juga menjalar ke ranah pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat. Anak-anak ikut merasakan suasana tegang akibat sikap orang tua, sementara kegiatan posyandu dan aktivitas bersama warga menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa konflik politik desa berimbas pada generasi muda dan melemahkan solidaritas sosial.

Terakhir, penelitian ini juga menemukan adanya harapan rekonsiliasi. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif untuk merangkul semua warga. Rekonsiliasi dipandang sebagai syarat utama agar demokrasi lokal tidak berhenti pada perebutan jabatan, melainkan mampu menghidupkan kembali kohesi sosial dan semangat gotong royong desa

Makna Esensial Pengalaman Partisipan dan Analisis Fenomenologi Empirik

1. Fragmentasi Sosial yang Meretakkan Kohesi Antarwarga (Transformasi Relasional)

Pilkades 2021 di Desa Tegalwaru memperlihatkan bahwa politik lokal memiliki daya rusak yang nyata terhadap hubungan antarwarga. Perbedaan pilihan politik yang semestinya hanya berlangsung pada masa kontestasi justru menjelma menjadi jarak sosial yang berkepanjangan. Aktivitas harian seperti bercengkerama di warung kopi, bergotong royong di sawah, atau menghadiri kegiatan desa mengalami penurunan drastis karena warga enggan bertemu dengan pihak yang berbeda pilihan. Bahkan, interaksi sederhana seperti menyapa tetangga tidak lagi berlangsung secara wajar, digantikan rasa canggung dan curiga.

Partisipan dari kubu kalah menuturkan pengalaman sosial yang sarat tekanan. Mereka merasa enggan hadir dalam kegiatan sosial maupun ritual budaya karena khawatir diperlakukan tidak setara. Beberapa memilih menarik diri dari kehidupan sosial desa untuk menghindari konfrontasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa polarisasi politik telah membentuk batas sosial yang nyata. Di sisi lain, partisipan dari kubu pemenang juga merasakan paradoks kemenangan: meskipun secara politik mereka berhasil, suasana sosial yang biasanya akrab berubah menjadi dingin. Kehangatan interaksi yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat desa menghilang secara perlahan.

Fenomena ini menegaskan pandangan Lederach (2003) bahwa relasi sosial dapat rusak akibat distribusi kekuasaan yang timpang antara kelompok menang dan kalah. Kebaruan penelitian ini adalah temuan bahwa fragmentasi tidak hanya muncul dalam interaksi umum, tetapi merembes hingga ke ruang-ruang keagamaan dan sosial yang sebelumnya bersifat netral. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi lokal tanpa rekonsiliasi justru dapat menimbulkan residu demokrasi berupa kerenggangan sosial yang menggerus kohesi masyarakat.

2. Diskriminasi Pelayanan Publik Berbasis Loyalitas Politik (Transformasi Struktural)

Salah satu residu konflik yang paling kuat dirasakan pasca Pilkades adalah diskriminasi pelayanan publik. Partisipan dari kubu kalah menyampaikan keluhan tentang sulitnya mengakses layanan administrasi desa. Proses yang biasanya sederhana, seperti pembuatan surat keterangan, izin usaha, atau dokumen kependudukan, sering diperlambat dengan alasan prosedural. Ironisnya, pada saat yang sama warga dari kubu pemenang mendapat pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan efisien. Hal ini memunculkan persepsi kuat bahwa pelayanan publik telah dipolitisasi dan tidak lagi netral.

Fenomena diskriminasi ini tidak hanya terjadi pada layanan administratif, tetapi juga menjalar ke dalam struktur pemerintahan desa. Perangkat desa yang diketahui mendukung calon yang kalah dipindahkan dari jabatan strategis, dipinggirkan dalam pengambilan keputusan, bahkan ada yang memilih mundur karena merasa tidak lagi memiliki ruang untuk bekerja netral. Kekuasaan kepala desa pasca Pilkades dimaknai bukan semata-mata sebagai amanah untuk melayani seluruh warga, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat basis politik.

Partisipan dari kubu pemenang menilai situasi tersebut secara berbeda. Mereka menganggap pelayanan cepat adalah bentuk penghargaan atas loyalitas politik. Pandangan ini mencerminkan pembenaran terhadap praktik diskriminatif, yang pada gilirannya memperlebar sekat sosial antarwarga. Dalam perspektif Lederach (2003), fenomena ini termasuk dalam transformasi struktural, di mana akses terhadap sumber daya digunakan sebagai alat dominasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa diskriminasi pelayanan publik tidak hanya menimbulkan ketimpangan birokrasi, tetapi juga menurunkan legitimasi pemerintah desa di mata sebagian warganya.

3. Kesenjangan Psikologis antara Kubu Menang dan Kalah (Transformasi Personal)

Euforia kemenangan pasca Pilkades memang nyata dirasakan oleh warga dari kubu pemenang. Mereka merasakan kebanggaan karena calon yang mereka dukung berhasil

menjadi kepala desa. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya menghadirkan kenyamanan sosial. Relasi dengan lawan politik menjadi renggang, interaksi sehari-hari berlangsung dengan penuh jarak, bahkan beberapa partisipan mengaku suasana desa justru lebih dingin dibandingkan sebelum pemilihan. Sebaliknya, warga dari kubu kalah menggambarkan pengalaman yang jauh lebih berat. Mereka merasa dipandang sebelah mata, kehilangan rasa percaya diri, bahkan enggan menyapa tetangga karena takut diabaikan. Beberapa mengaku malu menghadiri kegiatan desa karena khawatir mengalami diskriminasi. Luka emosional ini menunjukkan adanya dampak psikologis mendalam akibat kekalahan politik.

Kesenjangan psikologis ini bersifat laten dan berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya. Anak-anak yang menyaksikan renggangnya hubungan orang tua mereka dapat tumbuh dengan persepsi bahwa perbedaan politik identik dengan permusuhan. Kebaruan penelitian ini adalah penegasan bahwa dampak politik desa tidak berhenti pada level emosional sesaat, tetapi berpotensi menjadi trauma sosial jangka panjang yang menurunkan kualitas demokrasi local.

4. Dampak Multidimensi hingga Ranah Pendidikan dan Sosial (Transformasi Kultural)

Residu konflik politik tidak berhenti pada relasi personal atau pelayanan publik, tetapi meluas hingga ke ranah pendidikan dan sosial. Seorang guru honorer menuturkan bahwa ia menyaksikan orang tua murid bersikap canggung hanya karena berbeda pilihan politik. Anak-anak pun ikut merasakan ketegangan tersebut, sehingga ruang pendidikan yang seharusnya netral justru terkontaminasi suasana politik.

Kegiatan sosial desa juga mengalami penurunan signifikan. Partisipasi dalam posyandu, pengajian, arisan, dan gotong royong melemah bukan semata karena kesibukan, melainkan karena warga enggan berada dalam forum yang dihadiri lawan politik. Padahal, kegiatan tersebut sebelumnya berfungsi sebagai perekat solidaritas. Warga yang tetap hadir pun mengaku suasana kebersamaan terasa hambar, karena interaksi dibatasi oleh jarak emosional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas keagamaan terkikis oleh rivalitas politik. Dalam kerangka transformasi kultural Lederach (2003), hal ini menandakan kerusakan pada fondasi nilai dan norma sosial. Kebaruan penelitian ini adalah penegasan bahwa residu konflik politik desa bersifat multidimensi, tidak hanya memecah relasi sosial, tetapi juga menggerus nilai

budaya yang seharusnya menjadi perekat masyarakat. Jika tidak ditangani, generasi berikutnya akan tumbuh dengan warisan budaya curiga dan keterpecahan.

5. Kebutuhan Mendesak akan Rekonsiliasi untuk Memulihkan Kehidupan Bersama

Di tengah fragmentasi dan diskriminasi yang terus berlangsung, partisipan menekankan kebutuhan mendesak akan rekonsiliasi. Tokoh masyarakat menilai bahwa kepala desa terpilih harus berperan sebagai pemimpin inklusif, bukan hanya pemimpin kelompok pemenang. Rekonsiliasi dipandang sebagai prasyarat agar kehidupan desa kembali harmonis.

Partisipan dari kubu pemenang cenderung melihat rekonsiliasi sebagai tanggung jawab pihak yang kalah untuk lebih legowo, sementara partisipan dari kubu kalah menekankan perlunya kepala desa menjamin netralitas dan keadilan. Perbedaan perspektif ini memperlihatkan bahwa rekonsiliasi disadari penting oleh kedua belah pihak, meskipun maknanya tidak selalu sama.

Tokoh masyarakat menyebut rekonsiliasi bukan sekadar pilihan moral, tetapi kebutuhan sosial-politik untuk mencegah keretakan lebih dalam. Upaya yang mereka usulkan meliputi komunikasi lintas kubu, penyelenggaraan kegiatan sosial bersama, serta keterlibatan semua pihak dalam pembangunan desa.

Makna esensial dari pengalaman ini adalah bahwa demokrasi lokal tidak boleh dipahami hanya sebagai perebutan jabatan, melainkan momentum untuk memperkuat persaudaraan warga. Tanpa rekonsiliasi, demokrasi hanya akan menghasilkan pemimpin formal tanpa mampu menjaga harmoni kehidupan desa. Dengan demikian, rekonsiliasi menjadi kunci utama untuk mengatasi residu demokrasi sekaligus membangun fondasi kohesi sosial yang baru.

Hasil Penelitian di Desa Tegalwaru menunjukkan bahwa Pilkades 2021 melahirkan polarisasi sosial yang tajam. Warga terbagi dalam dua kubu dengan pengalaman berbeda: kelompok pemenang merasakan pelayanan lebih cepat, pembangunan infrastruktur lebih merata, serta birokrasi yang lebih solid, sedangkan kelompok kalah justru mengalami diskriminasi, keterasingan sosial, dan marginalisasi dalam pelayanan publik maupun akses pembangunan.

Fenomena ini sesuai dengan teori kekuasaan Weber (Soekanto, 2006) yang menekankan bahwa pihak berkuasa cenderung mengatur akses sumber daya sesuai kepentingannya. Hal ini tampak dalam persepsi berbeda terhadap pelayanan: kubu pemenang melihat efisiensi, kubu kalah menilai diskriminasi. Dahrendorf (Poloma, 2000)

menjelaskan hal ini sebagai relasi dominan-terdominasi, di mana dominasi ditafsirkan positif oleh pemenang, tetapi negatif oleh yang kalah.

Konflik juga merambah pembangunan desa. Kelompok kalah menilai wilayah mereka terabaikan, sementara kubu pemenang menekankan pembangunan bertahap. Temuan ini sejalan dengan teori patron-klien (Dwipayana, 2003) yang menyoroti praktik balas budi politik. Selain itu, hubungan sosial antarwarga melemah; gotong royong dan partisipasi kegiatan menurun karena adanya jarak psikologis. Hal ini mengonfirmasi pandangan Soekanto (2006) bahwa konflik yang tidak terselesaikan mengikis solidaritas. Euforia kemenangan pemenang di satu sisi menghadirkan legitimasi politik, tetapi di sisi lain memperdalam luka emosional pihak kalah. Hal ini sejalan dengan tesis Huntington (1991) bahwa demokrasi prosedural tanpa inklusivitas memicu polarisasi. Konflik juga merembet ke dunia pendidikan dan kegiatan sosial, menunjukkan konstruksi realitas yang berbeda antar kubu.

Tokoh masyarakat menekankan pentingnya rekonsiliasi. Pandangan ini sesuai dengan Haris (2005) yang menilai lemahnya tradisi rekonsiliasi di demokrasi lokal Indonesia. Tanpa rekonsiliasi, demokrasi hanya menghasilkan pengalaman ganda: legitimasi bagi pemenang dan eksklusivitas bagi yang kalah. Dengan demikian, Pilkades di Tegalwaru memperlihatkan dua wajah demokrasi lokal: sebagai sarana partisipasi politik sekaligus sumber polarisasi sosial. Demokrasi lokal membutuhkan nilai inklusif dan rekonsiliasi agar dapat memperkuat solidaritas, bukan justru memperlebar sekat sosial.

SIMPULAN

Penelitian tentang Residu Demokrasi di Desa Tegalwaru menunjukkan bahwa Pilkades 2021 menyisakan fragmentasi sosial, diskriminasi pelayanan, dan menurunnya solidaritas. Analisis dengan teori transformasi konflik John Paul Lederach mengungkap konflik terjadi di empat dimensi: personal (luka psikologis dan keterasingan), relasional (melemahnya komunikasi), kultural (tergerusnya nilai gotong royong), dan struktural (diskriminasi tata kelola). Konflik ini bersifat jangka panjang, berpotensi diwariskan antargenerasi, dan mencerminkan paradoks demokrasi lokal: prosedur berjalan, tetapi demokrasi substantif belum terwujud. Oleh karena itu, penyelesaian konflik perlu pendekatan transformasi yang holistik agar demokrasi lokal lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*.
- Akbar Kurniadi, T. L. (2019). Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 91-108.
- Alamudin. (2007). *Demokrasi dalam Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahari., Y. (Bandung). *Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pamakang dan Pati Nyawa pada Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat*. 2005: Program PPS Unpad.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pusat.
- Butler, M. J. (2009). *International Conflict Management*. London : routledge.
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* . SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (1958). Toward a Theory of Social Conflict. *The Journal of Conflict Resolution*, 170-183.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Desa, P. S. (2018, November Minggu). Bupati: yang tidak Puas Gugat Secara Hukum. From Diambil kembali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang: : [https://karawangkab.go.id/berita/pilkades-serentak-67-desa-bupati yang-tidak-puas-gugat-secara-hukum](https://karawangkab.go.id/berita/pilkades-serentak-67-desa-bupati-yang-tidak-puas-gugat-secara-hukum)
- Dewi, Y. K. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Edi. (2019). *Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 167–191.
- Greig, J. M. (2019). *International Conflict Management*. Boston: Polity Press.
- Hardiman. (2010). *Diskursus dan Kekuasaan: Kritik terhadap Filsafat Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haris. (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Reformasi, Perencanaan, dan Tata Ruang*. Jakarta: LIPI Press.
- Hikam, A. (2019). Dinamika Konflik Politik di Pedesaan: Sebuah Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 145-159.

- Kirana. (2009). Teori legitimasi dalam organisasi. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse. Good Books.
- Mayo, H. B. (1955). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- MD., M. (2019). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miall, H. R. (2002). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
- Muhtadi. (2020). *Vote Buying dalam Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munandar, F. (2021). *Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)*. Bima: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar Filsafat Sosial*. Bandung: Lekkas.
- Ritzer, G. &. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Smith, J. (2020). *Conflict Transformation and Rural Governance: Lessons from Southeast Asia*. *Journal of Rural Studies*, 98-115.
- Smith, J. A. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE Publications.
- Soetomo. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subakti. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarta., J. K. (1997). *Integrasi dan Konflik: Kedudukan Politik Jawara dan Ulama dalam Budaya Politik Lokal*. Bandung: PPS Unpad Bandung.
- Surotinojo. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan*. Jakarta: LIPI Press.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik: Isu-isu konflik kontemporer (Vol. 1)*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, J. D. (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media.
- Sztompka, P. (2004). *Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Utami, G. N. (2021). *Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci*. *Jurnal IPDN*.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Newyork: Oxford University Press.

Zamroni. (2009). *Demokrasi, Pendidikan dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zamroni. (2011). *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.